

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, Syed Hussain, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, West Group, St. Paul Minn.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Kasim, Ihdhal (Editor), 2001, *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, Elsam, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Adnan Buyung dan Zen, A. Patra M (Penyunting), 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Pohan, Agustinus, Santoso, Topo dan Moerings, Martin (Editor), 2012,

Hukum Pidana dalam Perspektif, Pustaka Larasan, Denpasar.

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Utrecht, E, 1960, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung.

_____, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Vollmar, H.F.A., 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wijayanto dan Zachrie, Ridwan (Editor), 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wiyono, R, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Makalah dan Jurnal

Hiariej, Eddy O.S., 2012, "Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari

2012.

Indrayana, Denny, 2004, “Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi”, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004.

Suhartoyo, 2014, “Implementasi Asas *Equality Before The Law* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dapat Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Guna Mempertanggung Ketahanan Nasional”, Revisi Esai Blok, Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

The Universal Declaration of Human Rights, 1928

International Covenant on Civil and Political Rights

ASEAN Human Rights Declaration

United Nations Convention Against Corruption, 2003

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 12/Pid/TPK/2014/PT.DKI. atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/Pid/TPK/2013/PT.DKI atas nama Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq

Artikel Internet

Bilal Ramadhan, “Ini Pentingnya Pencabutan Hak Politik Koruptor Bagi KPK”,
[http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/16/nbyyy2-
ini-pentingnya-pencabutan-hak-politik-koruptor-bagi-kpk](http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/16/nbyyy2-
ini-pentingnya-pencabutan-hak-politik-koruptor-bagi-kpk), diakses
tanggal 22 Februari 2015

Desca Lidya Natalia, “Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif”,
[http://www.antaraneews.com/berita/467187/ketua-kpk-korupsi-
indonesia-terstruktur-dan-masif](http://www.antaraneews.com/berita/467187/ketua-kpk-korupsi-
indonesia-terstruktur-dan-masif), diakses tanggal 21 Februari 2015

_____, “Laporan OECD Sebut Perilaku Korupsi Melilit Negara Maju”,
[http://news.detik.com/read/2014/12/03/104102/2766184/1513/laporan-
-oecd-sebut-perilaku-korupsi-mlilit-negara-maju](http://news.detik.com/read/2014/12/03/104102/2766184/1513/laporan-
-oecd-sebut-perilaku-korupsi-mlilit-negara-maju), diakses tanggal 4
Februari 2015

_____, “Corruption Perception Index 2014”,
[http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-
perceptions-index-2014](http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-
perceptions-index-2014), diakses tanggal 21 Februari 2014